BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi negara (Setiawan, 2023). Faktanya, tantangan kemiskinan masih menjadi persoalan utama di Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2021 persentase penduduk miskin tercatat sebesar 10,14% atau sekitar 27,54 juta jiwa. Jumlah tersebut menurun menjadi 9,54% (26,16 juta jiwa) pada Maret 2022 dan 9,36% (25,90 juta jiwa) pada Maret 2023 (Badan Pusat Statistik, 2023). Meskipun mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tingkat kemiskinan di Indonesia tetap tergolong signifikan.

Salah satu faktor penyebab kemiskinan di Indonesia adalah rendahnya produktivitas di sektor pertanian yang sering kali disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, teknologi, dan sarana pendukung (Sinurat, 2023). Terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja memperparah kondisi tersebut, sehingga menyulitkan masyarakat beralih ke pekerjaan yang lebih stabil dan berpenghasilan lebih baik. Selain itu, banyak masyarakat yang bergantung pada sektor informal tanpa jaminan sosial seperti pengemudi ojek online, buruh harian lepas, dan pemulung. Ketidakstabilan penghasilan di sektor informal membuat masyarakat rentan terhadap perubahan ekonomi seperti fluktuasi harga bahan pokok, kenaikan biaya hidup, atau dampak bencana alam (Putri et al., 2024).

Di kota besar seperti Surabaya, pekerjaan di sektor informal masih mendominasi dan menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di wilayah tersebut (Anggraeni, 2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 3,96 persen atau sekitar 116,62 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023). Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun Surabaya merupakan pusat ekonomi di Jawa Timur, masih ada segmen masyarakat yang belum mampu menikmati hasil pembangunan ekonomi secara merata.

Kelompok masyarakat miskin di Surabaya umumnya memiliki penghasilan yang tidak menentu, sebagian besar bekerja sebagai pedagang kecil, buruh harian, atau pekerja tanpa kontrak di sektor informal. Orang-orang dalam kelompok tersebut sering tinggal di kawasan padat penduduk atau permukiman kumuh dengan fasilitas dasar yang terbatas, seperti sanitasi buruk dan akses air bersih yang minim (Andini, 2021). Selain itu, kelompok tersebut juga kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang memperburuk kondisi ekonomi dan menghambat peluang peningkatan kualitas hidup.

Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan, perlu memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin. Hal tersebut hanya bisa tercapai jika data yang digunakan transparan dan terintegrasi dengan baik. Data yang jelas dan terbuka memungkinkan pemerintah untuk memantau dengan tepat apakah kebijakan yang dijalankan sudah mencapai target, memastikan penggunaan anggaran sesuai sasaran, serta mengenali wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian lebih terkait kemiskinan (Sirait, 2016).

Pendekatan berbasis data dan analisis terukur diperlukan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Surabaya. Analisis deskriptif dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi kemiskinan sekaligus mengevaluasi efektivitas program sosial yang telah dijalankan. Menurut Sugiyono (2019) dalam (Riani Elisabeth & Kusdian Novanti, 2023), analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang ada tanpa bermaksud membuat generalisasi atau kesimpulan yang berlaku secara umum. Dengan menggunakan analisis deskriptif, pemerintah dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan serta mengetahui apakah program yang ada sudah tepat sasaran atau perlu disesuaikan (Nisa, 2023).

Analisis deskriptif dapat disajikan dalam bentuk dashboard untuk mempermudah penyusunan, pengelolaan, dan penyajian data secara lebih informatif (Taqhsya et al., 2024). Dengan memanfaatkan dashboard visualisasi data, tren kemiskinan dari tahun ke tahun serta dampak dari bantuan sosial yang

diberikan oleh pemerintah dapat diidentifikasi sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang ada. Selain itu, dashboard juga diharapkan tidak hanya memberikan informasi yang mentah, tetapi juga insight yang berguna sehingga masyarakat dapat melihat secara jelas bagaimana anggaran sosial digunakan dan bantuan sosial disalurkan serta bagaimana kemiskinan ditangani dari tahun ke tahun.

Dalam pembuatan dashboard, beberapa tools akan digunakan untuk pengolahan data, analisis statistik, dan visualisasi. Beberapa di antaranya adalah platform pengembangan web seperti PHP atau JavaScript, serta alat visualisasi seperti Tableau atau Power BI untuk menyajikan data dalam bentuk grafis yang mudah dipahami. Keberhasilan sebuah dashboard dalam menyajikan data sangat bergantung pada keakuratan data yang digunakan serta kemampuan dalam merancang tampilan data yang sesuai dengan kebutuhan pengguna (Sensuse & Suhaidir, 2012). Informasi yang disajikan harus cukup detail agar memberikan gambaran yang jelas, tetapi tetap sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan.

Pembuatan dashboard berbasis website untuk transparansi data program kerja Dinas Sosial Surabaya merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas penanganan kemiskinan. Dengan menggunakan deskriptif analitik, dashboard tersebut tidak hanya akan menyajikan data mentah, tetapi juga memberikan wawasan yang berguna bagi masyarakat dan pemerintah dalam memahami dinamika kemiskinan dan keberhasilan program sosial yang ada. Dengan data yang akurat dan penyajian yang baik, dashboard tersebut dapat menjadi media yang berguna dalam pengentasan kemiskinan di Surabaya dan daerah lainnya di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan sebuah permasalahan yang dapat diangkat sebagai topik Praktek Kerja Lapangan ini, yaitu bagaimana merancang dan mengembangkan sistem berbasis website yang transparan dan akuntabel untuk mendukung program kerja Dinas Sosial Kota Surabaya.

1.3 Batasan Masalah

Agar fokus dan ruang lingkup permasalahan lebih jelas, batasan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Sistem yang dirancang hanya akan mencakup program kerja Dinas Sosial Kota Surabaya, tanpa mencakup instansi atau program kerja lainnya.
- 1.3.2 Sistem yang dikembangkan berbasis website dan tidak mencakup aplikasi mobile.
- 1.3.3 Informasi yang ditampilkan terbatas pada data program kerja yang telah diotorisasi untuk publikasi oleh Dinas Sosial Kota Surabaya.
- 1.3.4 Website hanya menyajikan informasi dalam bentuk data program sosial, distribusi bantuan, dan kinerja layanan masyarakat.

1.4 Tujuan

Tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1.4.1 Mengembangkan sistem berbasis website yang transparan dan akuntabel untuk mendukung kinerja Dinas Sosial Kota Surabaya dalam menyampaikan informasi program kerja kepada masyarakat.
- 1.4.2 Mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait program dan kegiatan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial.
- 1.4.3 Meningkatkan partisipasi publik melalui penyediaan platform yang interaktif dan mudah diakses.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1.5.1 Secara Teoritis

Berkontribusi dalam keilmuan di bidang ilmu komputer mengenai perancangan sistem informasi manajemen berbasis website.

1.5.2. Secara Praktis

1.5.2.1 Bagi Penulis:

- a. Penulis mendapatkan pengalaman langsung dalam mengembangkan website yang mendukung transparansi informasi.
- b. Penulis dapat menerapkan ilmu yang dipelajari dan meningkatkan kemampuan dalam pengembangan sistem berbasis web.

- c. Hasil dari proyek dapat digunakan sebagai portofolio untuk menunjukkan kemampuan penulis dalam mengembangkan solusi teknologi.

1.5.2.2. Bagi Instansi (Dinas Sosial Kota Surabaya)

- a. Dinas Sosial dapat meningkatkan keterbukaan informasi terkait program-program sosial.
- b. Mempermudah komunikasi Dinas Sosial Kota Surabaya dengan masyarakat.
- c. Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan pelaporan program sosial.
- d. Memberikan dasar yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam merancang kebijakan sosial.
- e. Mempercepat identifikasi masalah dan area yang membutuhkan intervensi lebih cepat, sehingga program dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat.